

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

### IMPLEMENTATION OF INTEGRATED *STUNTING* PREVENTION POLICY

Nabila Udzrotu Shauma<sup>1\*</sup>, Dini Gandini Purbaningrum<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan

\*Koresponden email: [nabilaae12@gmail.com](mailto:nabilaae12@gmail.com)

#### ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagai upaya dalam pencegahan dan menurunkan angka *stunting* di wilayah Kabupaten Tangerang. Kecamatan Rajeg menjadi wilayah dengan angka kasus *stunting* yang cukup tinggi di Kabupaten Tangerang. Dalam proses pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg masih terdapat permasalahan yakni terkait pemahaman masyarakat terhadap pencegahan *stunting* yang masih kurang dan koordinasi antar pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan masih terdapat indikator yang belum tercapai dengan baik. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi belum optimal, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pencegahan *Stunting*, Terintegrasi

#### ABSTRACT

*The Tangerang Regency Government-issued Regent Regulation Number 16 of 2020 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention as an effort to prevent and reduce stunting rates in the Tangerang Regency area. Rajeg District is an area with a fairly high number of stunting cases in the Tangerang Regency. In the process of implementing the integrated stunting prevention acceleration policy in the Rajeg subdistrict, there are still problems related to public understanding of stunting prevention which is still lacking, and coordination between implementers in implementing policies that have not been optimal. This study aims to analyze the implementation of an integrated stunting prevention acceleration policy in Rajeg District, Tangerang Regency. This type of research is qualitative with descriptive method. Data collection by interview, documentation, and observation methods. The results of the study based on the analysis using the Van Meter and Van Horn policy implementation models show that there are still indicators that have not been achieved properly. Human resources at the lower levels, especially cadres, are still lacking both in terms of quantity and quality. The characteristics of implementing organizations have not been met properly. The attitude of the implementers, especially on public understanding of the policy is still lacking. Communication and coordination have not been optimal, because there are still activities that are not on target in their implementation. The social environment, economic environment, and political environment have not fully supported the success of the integrated stunting prevention acceleration policy.*

**Keywords:** Policy Implementation, Stunting Prevention, Integrated

#### PENDAHULUAN

*Stunting* menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. *stunting* adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan sesuai umur (PB/U) atau

tinggi badan berdasarkan usia (TB/U) dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stunted) dan <-3 SD (sangat pendek/severely stunted) (Fahmil Usman 2020). Dapat dikatakan *stunting* adalah masalah kronis yang terjadi sejak masa kehamilan sampai anak berusia

dibawah dua tahun, dimana kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi dari standar median yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO).

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* pada balita tercatat 27,76% (Kominfo 2021). Angka prevalensi *stunting* di Indonesia ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal angka *stunting* yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO), yaitu kurang dari 20%. Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *stunting*, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan *stunting*, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor (Bappenas 2021).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 *stunting* di Kabupaten Tangerang berada diangka 23,2% dan ini masih di atas batas ambang yaitu kurang dari 20% yang ditetapkan oleh WHO. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang harus diatasi secara multisektor.

Melihat masih tingginya angka *stunting* di beberapa kecamatan kabupaten Tangerang menunjukkan koordinasi lintas Sektor yang belum dilakukan secara optimal. Peran masyarakat dalam upaya mencegah *stunting* juga sangat diperlukan dalam keberhasilan pencegahan *stunting*. Namun melihat keadaan yang terjadi saat ini masih kerap kali ditemukan masyarakat yang belum mengetahui betul perihal *stunting*, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan (Tumanger 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai Persepsi Sosial Tentang *Stunting* di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Liem et al. (2019) menunjukkan hasil istilah *stunting* belum disertai dengan persepsi sosial yang benar, yaitu faktor kekurangan gizi didalamnya. Se-

hingga dapat dikatakan masyarakat belum mengetahui betul makna *stunting* yang sebenarnya dan berdampak pada partisipasi masyarakat yang tidak optimal dalam mencegah *stunting*. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat tersebut dapat mengakibatkan tingginya angka *stunting*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait faktor yang paling dominan terhadap kejadian *stunting* di puskesmas Rajeg, Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Siallagan et al. (2021). Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kejadian *stunting* pada balita di puskesmas Rajeg kabupaten Tangerang, faktor yang paling dominan terhadap kejadian *stunting* pada balita di puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang adalah ibu hamil pada saat usia yang berisiko disaat organ reproduksi belum matang secara sempurna yakni, pada usia kurang dari 20 tahun yang disebabkan oleh pernikahan dini. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan faktor sosial sangat berpengaruh dalam menimbulkan kejadian *stunting*.

Tingginya Kejadian *stunting* di suatu daerah secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, sebab faktor non kesehatan seperti ketersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, hingga masalah ekonomi keluarga berpengaruh 70% dalam menambah angka *stunting* (Saaadatudaraen 2021). Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun belakangan, warga miskin di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Sebesar 7,12 persen atau sekitar 272.000 penduduk masuk dalam kategori miskin. Sejalan dengan data BPS hasil susenas (survei sosial ekonomi nasional) pada tahun 2021 menunjukkan angka kemiskinan di kabupaten Tangerang meningkat 0,89 persen hampir 1 persen atau meningkat menjadi 7,12 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,23 persen (Berita Satu 2021). Pasalnya faktor ekonomi dan sosial keluarga dapat menyebabkan terjadinya *stunting* pada anak (Oktavia, 2021).

Angka *stunting* di wilayah Kabupaten Tangerang masih kerap kali ditemukan, masih terdapat 10 desa di Kabupaten Tangerang yang memiliki angka kasus *stunting* yang cukup tinggi, yakni tercatat sekitar 15.318 balita di Kabupaten Tangerang, yang masih teridentifikasi *stunting* (Kabarbanten.com 2021). Terdapat 5 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan kasus *stunting* tertinggi yakni di antaranya pada Puskesmas Rajeg sebanyak 1.551 Balita, Puskesmas Sepatan 832 Balita, Puskesmas Sukamulya 803 Balita, Puskesmas Binong 794 Balita dan Puskesmas Sindang Jaya sebanyak 730 Balita (Poskota 2021). Berdasarkan data tersebut menunjukkan Puskesmas

di Kecamatan Rajeg memiliki angka kasus *stunting* yang tertinggi. Adapun data secara rinci kasus anak *stunting* di Kecamatan Rajeg dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Jumlah *Stunting* di Kecamatan Rajeg bulan Agustus Tahun 2021 (Puskesmas Rajeg dan Puskesmas Sukatani, diolah April 2022)

No	Desa	Jumlah Anak <i>Stunting</i>
1	Rajeg	382
2	Rajeg Mulya	213
3	Lembang Sari	1
4	Tanjakan Mekar	1
5	Sukasari	128
6	Rancaa Bango	36
7	Mekarsari	601
8	Tanjakan	139
9	Daon	12
10	Sukatani	38
11	Sukamanah	34
12	Pangarengan	7
13	Jambu Karya	9
<b>Jumlah</b>		<b>1601</b>

Selain itu Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga dijadikan sebagai wilayah lokasi fokus pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang, berikut secara rinci daftar wilayah lokus *stunting* di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.** Daftar Kecamatan dan Desa Lokasi Fokus Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Bappeda Kabupaten Tangerang, diolah Mei 2022)

No	Kecamatan dan Desa	Jumlah Balita <i>Stunting</i> (kasus)
1	Kecamatan Rajeg 1. Desa Rajeg Mulya : 487 2. Desa Sukasari : 233 3. Desa Tanjakan : 130	850
2	Kecamatan Teluk Naga 1. Desa Tegal Angus : 159 2. Desa Muara : 83 3. Desa Tanjung Pasir : 47	289
3	Kecamatan Mauk 1. Desa Sasak : 115 2. Desa Banyu Asih : 131	290
4	Kecamatan Sepatan 1. Desa Pondok Jaya : 229	229
5	Kecamatan Kresek 1. Desa Ranca Ilat : 22	22

Berdasarkan daftar lokus *stunting* Kabupaten Tangerang diatas, Kecamatan Rajeg menjadi salah satu kecamatan yang masuk kedalam lokus *stunting* di Kabupaten Tangerang dengan memiliki angka kasus *stunting* tertinggi diantara kecamatan-kecamatan lainnya yang dijadikan lokus *stunting* di Kabupaten Tangerang. Sehingga berdasarkan data dan permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg. Pada Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, teori Van Meter dan Van Horn digunakan karena terdapat indikator lingkungan eksternal yang dianggap relevan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

**METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam yang diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari OPD di Kabupaten Tangerang yakni informan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Selain itu Informan dari Kecamatan Rajeg terdiri dari Sekretaris Camat, Ahli Gizi di Puskesmas Rajeg, Ahli Gizi di Puskesmas Sukatani, Kader Posyandu dan Masyarakat.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dokumen dan melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh baik berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik yang terkait

dengan pembahasan dalam penelitian. Sedangkan Observasi didalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk melihat penerapan Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan melakukan pencatatan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada analisa kualitatif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1984) dalam (Sugiyono 2019). Analisis data secara kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan empat komponen proses berupa pengumpulan data, reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan adalah implementasi kebijakan karena dalam melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak (Agustino 2019). Penelitian ini dianalisis dengan model implementasi kebijakan Van Meter, D. S., & Van Horn, (1975) yang terdiri dari 6 (enam) indikator yakni, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya. Karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

### *Ukuran dan Tujuan Kebijakan*

Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar dalam menjalankan kebijakan percepatan pence-

gahan *stunting*, pemerintah sudah memiliki standar yakni dengan adanya Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Jika dilihat adanya peraturan Bupati Kabupaten tangerang No.16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah cukup efektif untuk dijadikan landasan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

Kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat dan mengatasi masalah *stunting* yang terjadi di wilayah kabupaten Tangerang yang harus diatasi secara multisektoral. Dalam Hal ini Kecamatan Rajeg merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang yang memiliki kasus *stunting* yang cukup tinggi. Sasaran dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang samapai ke tingkat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, sasaran masyarakat terdiri dari kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif.

Para pelaksana sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dan sudah dijalankan, namun masih terdapat OPD yang tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, pemahaman terkait standar, tujuan dan sasaran belum seragam di beberapa OPD yang terkait.

### *Sumber Daya*

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya yang dimaksud dalam

hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial/anggaran.

Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi terlihat dari dibentuknya tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* yang terdapat di setiap organisasi perangkat daerah dan lintas sektor yang berada di Kabupaten Tangerang, namun tim koordinasi percepatan pencegahan *stunting* ini belum ditetapkan di tingkat Kecamatan Rajeg. Selain itu jika dilihat dari ketersediaan jumlah kader posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg khususnya di wilayah kerja Puskesmas Rajeg masih kurang dari jumlah standar kader yang seharusnya.

Selain kuantitas yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia adalah kualitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg, kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang, dilihat dari pemahaman dalam pencegahan *stunting* yang masih rancu dengan gizi buruk. Selain itu terkait kompetensi kader yang berada di Kecamatan Rajeg belum mampu memanfaatkan dan memahami teknologi dengan baik dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak sebagai upaya pencegahan *stunting*, sehingga untuk dapat mencapai inputan secara menyeluruh dengan cepat dan tepat membutuhkan waktu yang lama.

### **Karakteristik agen pelaksana**

Karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat penting dalam kinerja implementasi kebijakan. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Menurut Van Meter Van Horn karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini dikaitkan dengan pembagian wewenang, SOP (*Standard Operational Procedures*) yang berlaku, dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan Pembagian wewenang sudah dijelaskan melalui Peraturan Bupati dan Surat Keputusan pendukungnya. Selain itu pembagian wewenang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sudah melibatkan berbagai sektor. Terkait SOP berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berada di tingkat Kabupaten yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial sudah memiliki SOP nya masing-masing dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, namun DPMPD tidak memiliki SOP terkait pencegahan *stunting* secara langsung. Selain itu terkait ketersediaan SOP di Kecamatan Rajeg berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yakni, Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani menjelaskan dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah memiliki SOP yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing, namun ketersediaan SOP belum sampai ke tingkat kader yang juga pelaksana kebijakan ditingkat bawah.

Pelaksanaan pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah dilakukan di tiap OPD masing-masing maupun melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin 3 bulan sekali bersama para tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kecamatan Rajeg juga dilaksanakan secara rutin melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap 3 bulan sekali.

### **Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi kebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau menolak atas kebijakan, dan intensitas sikap. Dalam penelitian ini indikator sikap pelaksana terbagi menjadi dua yakni, tanggapan para pelaksana dan pemahaman pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait sub indikator tanggapan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah cukup menerima dengan adanya kebijakan percepatan

pengecahan *stunting* terintegrasi ini. Sikap penerimaan atau penolakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan selain sub indikator-indikator lainnya dalam implementasi kebijakan.

Selain tanggapan terhadap kebijakan, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga diperlukan pemahaman terhadap kebijakan yang perlu dimiliki oleh para pelaksananya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menunjukkan para pelaksana sudah dapat memahami dengan baik terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Namun pemahaman masyarakat terkait kebijakan di Kecamatan Rajeg masih kurang, karena masih terdapat pemahaman-pemahaman terkait *stunting* yang rancu dengan gizi buruk dan masih banyak yang belum *aware* dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Selain itu pemahaman para kader dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini masih terkendala akibat seringnya pergantian rotasi jabatan dan rancu terhadap pemahaman *job desk* nya masing-masing karena masih terdapat rangkap jabatan yang dialami oleh kader. Sehingga dapat dikatakan pemahaman para pelaksana di Kecamatan Rajeg masih kurang, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sulistio (2017) bahwa sikap Pelaksana dikatakan baik jika pelaksana atau implementor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pelaksana.

#### ***Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana***

Dalam mewujudkan keberhasilan pengimplementasian kebijakan juga dibutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi sudah dilakukan oleh para pelaksana. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan terkait pencegahan *stunting*, rapat-rapat rutin serta pelak-

sanaan pengawasan dan evaluasi. Selain pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara formal, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi juga dilakukan secara informal melalui grup *Whatsapp*.

Namun dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kecamatan Rajeg berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masih terdapat kendala terkait koordinasi oleh para perangkat desa dalam merencanakan suatu kegiatan atau program untuk pencegahan *stunting*, masih ditemukan kegiatan atau program yang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan juknis atau standar yang berlaku dan kegiatan atau program yang sudah dibuat terkadang tidak dijalankan secara kontinyu. Dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana, karena pelaksanaan pencegahan *stunting* memerlukan kerja sama yang baik diantara multisektor. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya (Priyanto dan Noviana, 2018).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg terdapat kendala dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat, terkadang masyarakat sulit menerima penjelasan yang sudah diberikan sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun lalu juga membuat beberapa posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg menjadi vakum sementara karena kegiatan mobilisasi yang diabatasi akibat dari pandemi Covid-19.

Masalah yang tidak dapat diduga seperti pandemi Covid-19 juga mengakibatkan terkendalanya dalam mengkomunikasikan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat. Komunikasi yang kurang konsisten dan kurang akurat yang diberikan kepada para pelaksana sangat memungkinkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi harus terus dibangun diantara pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan suatu kebijakan, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi.

#### ***Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik***

Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat

perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo, Arifianti, dan Bisnis 2022). Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg, namun tidak dipungkiri masih terdapat juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya dan memahami dengan baik terkait pencegahan *stunting* karena terbatasnya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan pengetahuan terkait asupan yang bergizi. Asupan makanan bergizi yang tidak seimbang ini termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian di posyandu Kecamatan Rajeg menunjukkan tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak *stunting* rata-rata berada pada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Jika tingkat pengetahuan orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya *stunting* pada anak. Oleh karena itu dalam mendukung kondisi lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Rajeg, Puskesmas Rajeg mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan KP-ASI. Pemberian kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan ibu tidak cukup jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja perlu adanya komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada di Kecamatan Rajeg.

Terkait lingkungan ekonomi berdasarkan hasil wawancara dengan petugas gizi puskesmas di Kecamatan Rajeg rata-rata anak yang mengalami *stunting* di Kecamatan Rajeg berasal dari tingkat penghasilan atau perekonomian keluarga yang rendah. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok keluarga khususnya pada asupan makanan yang bergizi untuk anaknya. Asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang ini yang menimbulkan kejadian *stunting*. sependapat dengan Usman (2020) bahwasannya lingkungan ekonomi yang dikaitkan dengan kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi kurang di Indonesia. Oleh karena itu dalam membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi yang mendukung pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stun-*

*ting* terintegrasi melalui pemberian bantuan secara langsung, selain itu mengupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi, yang dilakukan oleh Puskesmas Rajeg dan Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg melalui kegiatan seperti Pos-Gizi, One day One Egg (ENDOG). Keping Emas, dan Kepal nasi.

Namun dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala yang dihadapi, contohnya pada kegiatan pemberian One Day One Egg (ENDOG) karena rendahnya perekonomian yang dialami oleh suatu keluarga mengakibatkan pemberian 30 butir telur yang seharusnya dapat maksimal diberikan selama 1 bulan penuh kepada anaknya yang mengalami *stunting*, namun telur tersebut dimakan secara bersama-sama oleh keluarganya, karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan betapa berpengaruhnya lingkungan ekonomi dalam mendukung pencegahan *stunting*.

## SIMPULAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang masih belum berjalan dengan optimal. Sumber daya manusia masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas para pelaksana khususnya yang berada di tingkat bawah. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, tanggapan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, namun pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi antar OPD yang berada ditingkat bawah masih kurang, sehingga masih terdapat kegiatan dalam pencegahan *stunting* yang tidak tepat sasaran. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data beserta informasi kepada penulis, yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Bappenas. 2021. Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia. <https://www.bappenas.go.id/>. <https://www.bappenas.go.id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg> (16 February 2022).
- Berita Satu. 2021. Meningkat, Angka Kemiskinan di Kabupaten Tangerang. <https://www.beritasatu.com/>. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/861925/meningkat-angka-kemiskinan-di-kabupaten-tangerang> (16 February 2022).
- Fahmil Usman, Bunga Astria Paramashanti. 2020. *Komitmen Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kabaranten.com. 2021. 10 Desa di Kabupaten Tangerang Angka Stunting Masih Tinggi. *Kabaranten.com*. <https://kabaranten.com/10-desa-di-kabupaten-tangerang-angka-stunting-masih-tinggi/> (22 October 2021).
- Kominfo. 2021. Pemerintah Harapkan Peran Aktif Keluarga dalam Penanggulangan Stunting. *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35353/pemerintah-harapkan-peran-aktif-keluarga-dalam-penanggulangan-stunting/0/berita> (12 October 2021).
- Liem, Silva, Hana Panggabean, dan Rustono Marta Farady. 2019. Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekologi Kesehatan* 18(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration & Society.
- Oktavia, Rizwiki. 2021. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Medika Utama* 03(01).
- Poskota. 2021. Duh, 4.780 Balita di Kabupaten Tangerang Alami *Stunting*, Penyebabnya Mengejutkan. <https://poskota.co.id/>. <https://poskota.co.id/2021/11/24/duh-4780-balita-di-kabupaten-tangerang-alami-stunting-penyebabnya-mengejutkan?halaman=1> (7 December 2021).
- Priyanto, Hary, dan Nana Noviana. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4(1).
- Saadatuddaraen. 2021. Balita Kabupaten Tangerang 8.5 Persen Alami Stunting. <https://rri.co.id/>. <https://rri.co.id/humaniora/kesehatan/989389/balita-kabupaten-tangerang-8-5-persen-alami-stunting> (31 October 2021).
- Siallagan, Dorsinta, Desi Rusiana, dan Ela Susilawati. 2021. Determinan Stunting pada Balita Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2020. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)* 4(1).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ke-27. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Serli Ani dan Eko Budi. 2017. Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 8(1).
- Sunaryo, Dian Rosa, Ria Arifianti, dan Departemen Administrasi Bisnis. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. 4:205–13.
- Tumanger, Rini Archda Saputri dan Jeki. 2019. Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. 1:1–9.